

# PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR DALAM SOSIALISASI POLITIK PADA PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF 2019

Oleh : Devin Nofia

Pembimbing : Drs. M. Y. Tiyas Tinov, M.Si

Email : [devin.nofia2230@student.unri.ac.id](mailto:devin.nofia2230@student.unri.ac.id)

[mtiyastinov@lecturer.unri.ac.id](mailto:mtiyastinov@lecturer.unri.ac.id)

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru,

Pekanbaru 28293 Telp/Fax. 0761-63277

## ABSTRACT

*The success of the election is influenced by how much public participation is in the election process. To increase community participation can be realized through political socialization. This outreach is one of the duties of the General Election Commission (KPU). The participation of the people of Tanah Datar Regency in the last 2019 legislative election experienced a significant increase compared to the previous election, reaching 72%. In the previous election, public participation only reached 65%. This means that the participation of the people of Tanah Datar has increased by 7% compared to the previous election, namely the 2014 election. This increase in participation is certainly inseparable from the role of the KPU, which is carrying out socialization regarding the holding of elections to the public.*

*The purpose of this study was to determine the KPU's role in political socialization to increase public participation in elections and to determine the KPU's internal and external constraints in carrying out socialization. This research uses a descriptive research type with a qualitative approach located at KPU Tanah Datar. Primary data sources were obtained from interviews, secondary data sources were obtained from documents related to the research topic. Data collection techniques obtained through interviews and documentation. The data analysis technique used is qualitative data analysis.*

*The results showed that the role played by the Tanah Datar KPU in increasing community participation was carried out through outreach activities. In carrying out socialization activities, the KPU of Tanah Datar Regency pays attention to the factors that influence the socialization, namely the material, methods and actors in carrying out the socialization. In carrying out socialization activities, KPU has internal constraints, namely a lack of budget and limited means of transportation to carry out socialization. While the KPU's external constraints are the lack of public response to socialization activities and there are still people who are apathetic towards politics.*

**Keywords :** *Socialization Materials, Socialization Actors, Socialization Methods*

## A. Pendahuluan

### 1. Latar Belakang Masalah

Peranan dalam aktivitas atau kegiatan politik terlihat dari adanya keikutsertaan masyarakat dalam memilih pemimpin. Pemilihan pemimpin menjadi salah satu indikator dari sistem demokrasi yang dianut oleh Indonesia. Alat ukur untuk mengetahui partisipasi, demokratisasi, dan legitimasi warga negara Indonesia dapat dilihat salah satunya melalui perilaku politiknya. Perilaku politik itu dapat dilihat dari berbagai jenis yaitu melalui aktivitas dan antusiasme masyarakat mendatangi tempat pencoblosan dalam pemilihan umum. Bentuk perilaku politik ini menjadi alat analisis untuk melihat partisipasi politik masyarakat itu sendiri. Termasuk di dalamnya pada pemilihan legislatif tahun 2019 yang lalu.

Keberhasilan pemilu tentunya sangat dipengaruhi oleh seberapa besar tingkat kesadaran politik warga negara yang bersangkutan. Kesadaran politik ini terefleksi dari seberapa besar partisipasi dan peran masyarakat dalam proses pemilu, dengan memberikan kesempatan kepada setiap warga negara untuk memberikan suara dukungannya dalam proses penetapan pemerintah baik di eksekutif maupun legislatif selaku pemangku kebijakan.

Partisipasi masyarakat dapat dilakukan salah satunya dalam bentuk sosialisasi pemilu. Sesuai ketentuan umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 448 ayat (2), menyebutkan bahwa “partisipasi masyarakat dapat dilakukan dalam bentuk: sosialisasi pemilu; pendidikan politik bagi pemilih; survei atau jajak pendapat tentang pemilu; dan penghitungan cepat hasil pemilu”. Kemudian pada ayat (3) dijelaskan bahwa hal ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas dan mendorong terwujudnya suasana yang

kondusif bagi penyelenggara pemilu yang aman, damai, tertib, dan lancar.

Dalam sistem politik semacam ini pemilihan umum tak dapat terlepas dari lembaga negara yang menjadi pondasi dalam penyelenggaraan pemilu yang disebut sebagai komisi pemilihan umum (KPU), baik dalam tingkat provinsi maupun tingkat daerah. Penyelenggara pemilu berpedoman kepada asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas agar melahirkan pemilihan umum yang bersifat demokratis.

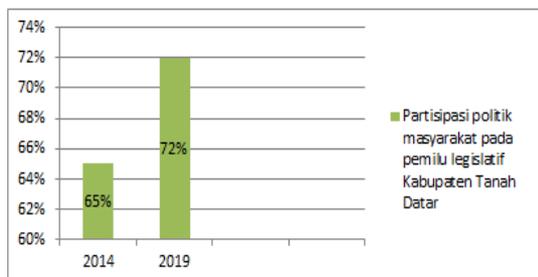
Kedudukan KPU termaktub dalam Pasal 22 e ayat (5) UUD 1945 yang menyatakan bahwa pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Hal tersebut juga terdapat dalam Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum.

Pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu 2019 juga diatur dalam Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2018. Ruang lingkup dalam peraturan komisi ini, mencakup sosialisasi, pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2018 pada Pasal 6 ayat (2) disebutkan bahwa “KPU, KPU Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melaksanakan sosialisasi pemilu dan pendidikan pemilih”. Pada pasal 4 peraturan ini, dijelaskan bahwa hal ini bertujuan menyebarluaskan informasi mengenai tahapan, jadwal dan program pemilu, meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam pemilu dan meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilu.

Pada pelaksanaan pemilihan umum legislatif di Tanah Datar pada pemilu 2019

yang lalu menunjukkan bahwa tingkat partisipasi politik masyarakat mengalami peningkatan dari pemilu 2014 ke pemilu 2019 hingga mencapai angka 72%. Angka ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibanding pemilu 2014 lalu yang hanya mencapai angka 65%. Ini artinya partisipasi politik masyarakat Tanah Datar pada pemilu legislatif 2019 mengalami peningkatan sebanyak 7% dibanding pemilu sebelumnya yaitu pada pemilu 2014.

**Grafik 1. Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Umum Legislatif Kabupaten Tanah Datar**

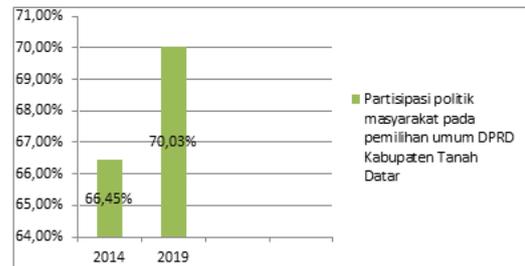


Sumber : Data KPU Tanah Datar

Berdasarkan data di atas, bahwasanya partisipasi politik masyarakat Tanah Datar pada pemilihan legislatif 2019 meningkat dari pemilu sebelumnya yaitu pada pemilu 2014. Partisipasi politik masyarakat Tanah Datar pada pemilu 2019 meningkat sebanyak 7% dibanding pemilu sebelumnya yaitu pada pemilu 2014.

Begitu juga halnya dengan pemilihan umum DPRD Kabupaten Tanah Datar. Partisipasi politik masyarakat Tanah Datar juga meningkat dari pemilu 2014 ke pemilu 2019. Peningkatannya mencapai angka 3,58% dari pemilu sebelumnya yaitu pemilu 2014.

**Grafik 1. Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Umum DPRD Kabupaten Tanah Datar**



Sumber : Data KPU Tanah Datar

Berdasarkan grafik di atas, dapat diketahui bahwasanya partisipasi politik masyarakat Tanah Datar pada pemilihan umum DPRD Kabupaten Tanah Datar meningkat dari pemilu sebelumnya yaitu pada pemilu 2014. Partisipasi politik masyarakat Tanah Datar pada pemilu 2014 adalah 66,45%, sementara pada pemilu 2019 mencapai angka 70,03%. Artinya, partisipasi politik masyarakat meningkat sebanyak 3,58% dibanding pemilu sebelumnya yaitu pada pemilu 2014.

Peningkatan partisipasi masyarakat dari pemilu sebelumnya ini tentunya tidak terlepas dari peran KPU yang mana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 18 bahwasanya “KPU Kabupaten/Kota bertugas mensosialisasikan penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat”. Sosialisasi merupakan kebutuhan dasar bagi pemilih. Hal ini bertujuan untuk mengajak pemilih tidak hanya tahu tentang bagaimana memilih yang baik dan benar, tetapi juga membangun kesadaran pemilih dan membangun daya kritis pada setiap proses tahapan pemilu.

Tetapi peningkatan partisipasi politik masyarakat Kabupaten Tanah Datar ini masih belum mencapai target nasional yang telah ditetapkan yaitu 77,5%. Artinya, Tanah Datar belum berhasil mewujudkan partisipasi masyarakat sesuai

standarisasi persentase yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Salah satu penyebabnya adalah masih terdapat masyarakat yang bersikap apatis terhadap politik.

Angka 77,5% ini merupakan acuan dalam meningkatkan persentase partisipasi politik masyarakat. Namun jika partisipasi politik masyarakat tidak mencapai target nasional yang telah ditetapkan, maka tidak menimbulkan dampak yang signifikan untuk setiap daerah. Jika tidak mencapai target nasional, maka akan menjadi bahan evaluasi untuk KPU sehingga KPU dapat memperbaiki sistem kerja untuk pemilu yang akan datang.

Dari uraian latar belakang di atas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian secara mendalam dan berusaha untuk mendeskripsikan ke dalam bentuk tulisan agar dapat dijadikan pedoman dalam hal peningkatan partisipasi politik masyarakat pada pemilihan umum dengan judul **“Peran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar Dalam Sosialisasi Politik Pada Pemilihan Umum Legislatif 2019”**.

## **2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana peran KPU Kabupaten Tanah Datar dalam sosialisasi politik pada pemilihan umum legislatif 2019?
2. Apa kendala internal maupun eksternal KPU Kabupaten Tanah Datar dalam sosialisasi politik pada pemilihan umum legislatif 2019 sehingga belum mencapai target nasional yang telah ditetapkan?

## **3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui peran KPU Kabupaten Tanah Datar dalam sosialisasi politik pada pemilihan umum legislatif 2019
2. Untuk mengetahui kendala internal maupun eksternal KPU Kabupaten Tanah Datar dalam sosialisasi politik pada pemilihan umum legislatif 2019 sehingga belum mencapai target nasional yang telah ditetapkan

## **B. Kerangka Teori**

### **1. Peran**

Peran menurut Koentjaraningrat, berarti tingkah laku individu yang memutuskan suatu kedudukan tertentu, dengan demikian konsep peran menunjuk kepada pola perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki status/posisi tertentu dalam organisasi atau sistem. Menurut Abu Ahmadi, peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosialnya.

Peran menurut Soekanto adalah proses dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Peranan mencakup tiga hal yaitu :

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.

3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

## 2. Pemilihan Umum (Pemilu)

Menurut Nurkinan, pemilihan umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur & adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila & Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Peraturan perundang-undangan juga telah menyebutkan bahwa pemilu dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Menurut Arry Dharmawan, pemilu merupakan salah satu pilar demokrasi sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan yang demokratis. Pemerintahan yang dihasilkan dari pemilu pun menjadi tolak ukur pelaksanaan demokrasi pada suatu negara, di mana rakyat secara langsung terlibat aktif dalam menentukan arah dan kebijakan politik negara untuk satu periode pemerintahan ke depan.

Kristiadi J menjelaskan dalam sistem politik semacam ini pemilu memiliki beberapa fungsi sebagai berikut. Pertama, ia merupakan institusi dan sekaligus instrumen untuk mengendalikan konflik-konflik kepentingan yang terjadi dalam masyarakat. Kedua, pemilu dapat pula berfungsi sebagai sarana untuk melakukan pergantian pemerintahan secara wajar dan damai. Ketiga, pemilu dalam pengertian yang lebih luas lagi, merupakan sarana untuk membangun basis legitimasi politik yang konstitusional bagi kekuasaan yang akan dibangun. Keempat, melalui pemilu juga dapat dilihat tingkat kedewasaan budaya politik nasional yang di sosialisasikan kepada rakyat selama kurun waktu pemerintahan yang lalu. Kelima, terutama melalui kampanye pemilu masyarakat berpeluang

memperoleh banyak informasi tentang berbagai kebijakan dan permasalahan yang dihadapi bangsa dan negara dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat

Syamsuddin Haris juga menjelaskan fungsi pemilihan umum sebagai sarana :

1. Legitimasi politik, dalam arti bahwa melalui pemilihan umum keabsahan pemerintah yang berkuasa dapat ditegakkan.
2. Fungsi perwakilan politik, dalam arti bahwa melalui pemilihan umum rakyat menentukan wakil yang dapat dipercaya untuk menduduki jabatan legislatif maupun eksekutif.
3. Pergantian atau sirkulasi elit penguasa, dalam arti pemilihan umum mempunyai keterkaitan dengan sirkulasi elit yang di asumsikan sebagai penguasa yang bertugas dan mewakili masyarakat.
4. Sarana pendidikan politik, dalam hal ini pemilihan umum dapat memberikan pendidikan politik secara langsung dan terbuka kepada masyarakat sehingga diharapkan masyarakat menjadi sadar akan kehidupan politik yang demokratis.

## 3. Sosialisasi Politik

Menurut Ramlan Surbakti, sosialisasi politik merupakan satu kesatuan metode penyampaian pesan politik yang dibagi menjadi dua yaitu pendidikan politik dan indoktrinasi politik. Sosialisasi politik merupakan bagian dari proses pendidikan politik yang didalamnya terdapat tujuan untuk membangun bagaimana seharusnya sikap masyarakat berpartisipasi melalui aktivitas politik dan sistem politik yang ada.

Susanto menyatakan bahwa melalui sosialisasi politik masyarakat dapat berpartisipasi untuk kepentingan hidupnya dan menciptakan generasi untuk kelestarian kehidupan selanjutnya. Menurut Susanto, faktor-faktor yang mempengaruhi sosialisasi di antaranya :

1. Materi Sosialisasi
2. Metode Sosialisasi
3. Pelaku Sosialisasi

Selanjutnya, menurut Rush dan Althoff setiap keberhasilan suatu proses sosialisasi politik ditentukan oleh faktor lingkungan dan keterkaitan unsur-unsur yang mempengaruhinya. Proses keberhasilan sosialisasi politik ditentukan oleh:

1. Agen sosialisasi politik, yang terdiri dari keluarga, pendidikan, media massa, kelompok sebaya, kelompok kerja, kelompok agama. Selain itu keberadaan kelompok kepentingan dan organisasi kemasyarakatan memberi pengaruh sebagai agen sosialisasi politik terhadap partisipasi masyarakat.
2. Materi sosialisasi politik, yaitu pengetahuan, nilai-nilai dan sikap politik yang hidup di masyarakat.
3. Mekanisme sosialisasi politik, yang di bagi menjadi tiga yaitu: imitasi, instruksi, motivasi.
4. Pola sosialisasi politik, proses yang terus berkesinambungan untuk mengetahui proses sosialisasi, yang terdiri dari badan atau instansi yang melakukan proses sosialisasi, hubungan antara badan atau instansi tersebut dalam melakukan proses sosialisasi.

### C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dalam pendekatan kualitatif data merupakan sumber deskripsi yang luas dan berlandaskan kukuh, serta memuat penjelasan tentang proses-proses yang terjadi dalam lingkup setempat. Penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif untuk membuat pencandraan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat populasi atau daerah tertentu serta cenderung menggunakan analisis.

Teknik analisis data adalah adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil

wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengelompokkan data ke dalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun dalam pola, memilih mana yang penting dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri atau orang lain.

### D. Hasil dan Pembahasan

#### 1. Peran KPU Dalam Sosialisasi Politik Pada Pemilu 2019

Dalam melaksanakan perannya untuk meningkatkan partisipasi politik, salah satu cara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Tanah Datar adalah dengan melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat. Sosialisasi yang dilakukan KPU Kabupaten Tanah Datar adalah sosialisasi mengenai pemilihan umum (pemilu), mengingat ranah KPU sendiri adalah penyelenggara pemilu. Dasar normatif dari adanya kegiatan sosialisasi pemilu adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum dan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2018 yang mencakup sosialisasi, pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu.

Dalam melakukan perannya untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat, KPU Kabupaten Tanah Datar melakukan berbagai program sosialisasi pemilu. Kegiatan tersebut dilakukan dengan berbagai konsep kegiatan, diantaranya seperti sosialisasi tatap muka KPU *Goes To School*, KPU *Run*, KPU Grebek Pasar, sosialisasi menggunakan Mobil Hallo-Hallo, konser musik, pagelaran seni. menghadiri forum-forum warga yaitu kelompok yasinan, kelompok tani, PKK, Gabungan Organisasi Wanita (GOW) dsb. Selain sosialisasi secara langsung, KPU juga melakukan kegiatan sosialisasi secara tidak langsung seperti memasang bahan sosialisasi di tempat strategis, melakukan siaran radio dan sosialisasi melalui media sosial.

Adapun mengenai acuan teknis dalam melaksanakan sosialisasi sendiri yaitu meliputi materi sosialisasi, metode sosialisasi dan pelaku dalam pelaksanaan sosialisasi.

### a. Materi Sosialisasi Politik

Salah satu hal yang diperlukan dalam melakukan sosialisasi adalah pemberian materi kepada sasaran yang dituju. KPU sendiri adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang ada di Indonesia, jadi ranah KPU dalam memberikan materi sosialisasi adalah materi mengenai pemilu.

Materi yang diberikan oleh KPU Kabupaten Tanah Datar disesuaikan dengan sasaran yang sudah ada. Penyesuaian tersebut dilakukan karena sasaran sosialisasi pemilihan ini berbeda-beda.

Pada pemilih berbasis keluarga, pemilih pemula, pemilih muda, pemilih berbasis komunitas, pemilih perempuan, pemilih berkebutuhan khusus, penyandang disabilitas, pemilih berbasis keagamaan, ormas dan kelompok marjinal serta masyarakat pada umumnya materi yang diberikan adalah materi mengenai pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih serta materi mengenai tata cara pemungutan suara, jadwal pemungutan suara, daftar nama calon, penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan. Selain itu, KPU juga menjelaskan mengenai tentang tujuan dari pemilu dan alasan mengapa masyarakat harus menggunakan hak suaranya dengan baik. Sedangkan untuk kelompok sasaran seperti partai politik dan LSM adalah materi mengenai sosialisasi pencalonan, materi sosialisasi kampanye, dan materi sosialisasi dana kampanye.

### b. Metode Sosialisasi Politik

Dalam menyampaikan materi sosialisasi pastinya dibutuhkan sebuah metode agar materi yang disampaikan

dapat diterima dengan baik oleh sasaran sosialisasi.

Sosialisasi yang dilakukan KPU Kabupaten Tanah Datar adalah sosialisasi dalam bentuk tatap muka seperti mengunjungi sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Tanah Datar, kegiatan ini disebut dengan KPU *Goes To School*; mengadakan acara maraton, kegiatan ini disebut KPU *Run*; mengunjungi pasar-pasar yang ada di Kabupaten tanah Datar, kegiatan ini disebut KPU Grebek Pasar; sosialisasi menggunakan keliling atau biasa disebut Mobil Hallo-Hallo; mengadakan acara konser musik; mengadakan acara pagelaran seni; serta menghadiri forum-forum warga yaitu kelompok yasinan, kelompok tani, PKK, Gabungan Organisasi Wanita (GOW) dsb.

Metode sosialisasi tatap muka yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Tanah Datar dilakukan dengan turun langsung ke lapangan dan mengundang sasaran sosialisasi yang dituju untuk hadir di berbagai kegiatan tersebut.

**Tabel 1. Daftar SMA/SMK/MA Sederajat yang Dikunjungi KPU Tanah Datar**

No.	Nama Sekolah
1.	MAN 2 BATU SANGKAR
2.	MAN 3 BATUSANGKAR
3.	MAN SUMPUR
4.	MAN SUNGAYANG B. SANGKAR I
5.	MAS PLUS PADANG GANTING
6.	MAS BALIMBING
7.	MAS BATU TABA
8.	MAS DINIYAH
9.	SMKN 01 BATUSANGKAR
10.	SMKN 01 LINTAU BUO
11.	SMKN 02 BATUSANGKAR
12.	MAS MUHAMMADIYAH
13.	MAS PETA
14.	MAS PLUS BARULAK
15.	MAS PONDOK PESANTREN AL-HARBI
16.	MAS PONTREN THAWALIB
17.	SMAN 2 LINTAU BUO
18.	SMK PAGARUYUNG
19.	SMK PLUS TARUNA BANGSA
20.	SMK JAYA TAMA BATUSANGKAR
21.	SMK KECIL SINGGALANG
22.	SMK MUHAMMADIYAH BATUSANGKAR
23.	SMK N 1 TANJUNG BARU
24.	SMK PROGRESIF BATUSANGKAR

25.	SMK Pagaruyung Batusangkar
26.	SMKN 01 BATIPUH
27.	SMA MUHAMMADIYAH BATUSANGKAR
28.	SMA N 3 BATUSANGKAR
29.	SMA NURUL IKHLAS
30.	SMAN 01 BATIPUH
31.	SMAN 01 BATUSANGKAR
32.	SMAN 01 LINTAU BUO
33.	SMAN 01 PADANG GANTING
34.	SMAN 01 PARIANGAN
35.	SMAN 01 RAMBATAN
36.	SMAN 01 SALIMPAUNG
37.	SMAN 01 SUNGAI TARAB
38.	SMAN 01 SUNGAYANG
39.	SMAN 01 X KOTO
40.	SMAN 02 BATUSANGKAR
41.	SMAN 02 RAMBATAN
42.	SMAN 02 SUNGAI TARAB

Sumber : Data KPU Tanah Datar

Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi KPU mendatangi beberapa sekolah yang ada di Kabupaten Tanah Datar, lebih tepatnya sebanyak 42 sekolah yang ada dari total keseluruhan sekolah yang ada di Tanah datar yaitu sebanyak 55 SMA/SMK/MA. Artinya, KPU mendatangi lebih dari 2/3 dari total keseluruhan sekolah yang ada di Tanah Datar. Dalam melaksanakan kegiatan ini KPU dibantu oleh kesbangpol, diskominfo serta relawan demokrasi.

Tidak hanya metode sosialisasi tatap muka saja, KPU Kabupaten Tanah Datar juga menggunakan metode sosialisasi yang sifatnya tidak turun langsung ke lapangan, seperti memasang bahan sosialisasi di tempat strategis, melakukan siaran radio dan sosialisasi melalui media sosial.

Penyampaian sosialisasi yang dilakukan KPU Kabupaten Tanah Datar dilakukan melalui bahan sosialisasi. Sosialisasi yang dilakukan KPU Kabupaten Tanah Datar menggunakan bahan sosialisasi yang bertujuan memberikan informasi terkait dengan pemilihan mulai dari pelaksanaan, informasi nama calon, tata cara pencoblosan dan proses pemungutan suara serta ajakan untuk ikut serta menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum.

Bahan sosialisasi yang digunakan adalah *leaflet*, *pamflet*, spanduk, brosur, *stiker*, *banner* dan baliho. Bahan sosialisasi seperti brosur dan *leaflet* dibagikan pada saat pelaksanaan sosialisasi, bahan sosialisasi seperti *banner* ditempatkan pada dinas-dinas pemerintah dan bahan sosialisasi seperti baliho, spanduk, *stiker* dan *pamflet* dipasang pada tempat yang strategis yakni pada tempat umum seperti di pasar tradisional, di pinggir jalan raya, di halte, di depan kantor kecamatan dan lain sebagainya.

Selain menggunakan bahan sosialisasi tersebut, KPU Kabupaten Tanah Datar juga memanfaatkan perkembangan internet sebagai salah satu metode yang digunakan dalam melakukan sosialisasi.

KPU Kabupaten Tanah Datar juga secara masif melakukan sosialisasi dengan media sosial seperti Instagram : @kpukabtanahdatar), Facebook :KPU Tanah Datar, Website : <https://kab-tanahdatar.kpu.go.id/>. Pelaksanaan sosialisasi melalui sosial media dan *website* yang dimiliki KPU Kabupaten Tanah Datar dilakukan karena berkembang pesatnya pengguna internet, khususnya daerah Kabupaten Tanah Datar. Sasaran dalam sosialisasi yang dilakukan melalui *website* dan sosial media ini bertujuan untuk menjangkau warga internet (netizen).

Selain dengan memanfaatkan sosial media dan laman *website*, KPU Kabupaten Tanah Datar juga melakukan sosialisasi melalui media elektronik, yaitu siaran melalui radio Luhak Nan Tuo Tanah Datar yang dilakukan setiap 1 bulan sekali.

**Tabel 2. Kegiatan Sosialisasi KPU Tanah Datar**

No	Nama Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Lokasi Kegiatan	Pelaksana Sosialisasi	Total Pelaksanaan Kegiatan
1	KPU Goes To School	Awal tahun 2018 hingga menjelang pemilu dilaksanakan	SMA/SMK/MA di Kabupaten Tanah Datar	<ul style="list-style-type: none"> <li>• KPU Tanah Datar</li> <li>• Kesbangpol</li> <li>• Relawan Demokrasi</li> </ul>	42 kali kunjungan ke 42 sekolah
2	KPU Grebek Pasar	Pertengahan tahun 2018	Pasar-pasar yang ada di Tanah Datar	<ul style="list-style-type: none"> <li>• KPU Tanah Datar</li> <li>• Relawan Demokrasi</li> <li>• Dibantu oleh Komunitas Pengamen Jalanan</li> </ul>	14 kali kunjungan ke 14 kecamatan di Tanah Datar
3	KPU On Air	Awal tahun 2018 hingga awal tahun 2019	Radio Luhak Nan Tuo Tanah Datar	<ul style="list-style-type: none"> <li>• KPU Tanah Datar</li> <li>• Diskominfo</li> <li>• Relawan Demokrasi</li> </ul>	12 kali siaran
4	Mobil Keliling	Akhir tahun 2018	Seluruh kecamatan di Tanah Datar	<ul style="list-style-type: none"> <li>• KPU Tanah Datar</li> <li>• Diskominfo</li> </ul>	14 kali kegiatan
5	KPU Run	April 2019	Lapangan Cindua Mato Batusangkar	<ul style="list-style-type: none"> <li>• KPU Tanah Datar</li> <li>• Stakeholder</li> <li>• Relawan demokrasi</li> </ul>	1 kali kegiatan
6	Konser Akbar	Maret 2019	Lapangan Cindua Mato Batusangkar	<ul style="list-style-type: none"> <li>• KPU Tanah Datar</li> <li>• Stakeholder</li> <li>• Relawan demokrasi</li> </ul>	1 kali kegiatan
7	Pagelaran Seni	Maret 2019	Lapangan Cindua Mato Batusangkar	<ul style="list-style-type: none"> <li>• KPU Tanah Datar</li> <li>• Stakeholder</li> <li>• Relawan demokrasi</li> </ul>	1 kali kegiatan
8.	Menyebarkan Brosur, pamflet dan sejenisnya	Tahun 2017 hingga menjelang pemilu dilaksanakan	Seluruh lokasi strategis di Kabupaten Tanah Datar	<ul style="list-style-type: none"> <li>• KPU Tanah Datar</li> <li>• Badan Adhoc</li> <li>• Stakeholder</li> <li>• Relawan demokrasi</li> </ul>	-
9.	Sosialisasi dengan mendatangi forum-forum warga	Awal tahun 2018 hingga menjelang pemilu dilaksanakan	Seluruh kecamatan di Kabupaten Tanah Datar	<ul style="list-style-type: none"> <li>• KPU Tanah Datar</li> <li>• Badan Adhoc</li> <li>• Stakeholder</li> <li>• Relawan demokrasi</li> </ul>	-
10.	Sosialisasi melalui media sosial serta website resmi KPU Tanah Datar	Awal tahun 2016 hingga menjelang pemilu dilaksanakan	Media sosial IG dan FB serta website KPU Tanah Datar	<ul style="list-style-type: none"> <li>• KPU Tanah Datar</li> <li>• Relawan demokrasi basis warganet</li> </ul>	-

Sumber : Data KPU Tanah Datar

Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa KPU melaksanakan berbagai kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan menjelang pemilu 2019 dilaksanakan. Dalam melaksanakan kegiatannya KPU berusaha menyisir seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Tanah Datar secara merata, agar seluruh masyarakat Kabupaten Tanah Datar

mendapatkan informasi mengenai kepemiluan tanpa terkecuali. Dengan tujuan meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam memilih pemimpin.

Perbedaan kegiatan sosialisasi yang dilakukan KPU Tanah Datar pada pemilu 2019 dengan pemilu 2014 yaitu pada pemilu 2019 cukup banyak variasi sosialisasi pendidikan pemilih. Beberapa kegiatan yang diadakan pada pemilu 2019 namun tidak diselenggarakan ketika pemilu 2014 adalah seperti kegiatan KPU *On Air*, KPU Grebek Pasar, Pagelaran Seni, Konser Musik dan sosialisasi melalui Media Instagram. Sehingga dengan penambahan kegiatan ini menjadi salah satu upaya dari KPU untuk meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilu dari pemilu sebelumnya yaitu pemilu 2014.

### c. Pelaku Sosialisasi Politik

Dalam penyampaian materi sosialisasi, salah satu faktor yang mendukung berhasil tidaknya penyampaian materi tersebut adalah pemateri atau aktor-aktor yang melakukan sosialisasi politik.

Dalam melakukan sosialisasi pemilihan, Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia yang bertugas dalam melakukan kegiatan sosialisasi pemilu karena merupakan bidang kerjanya. Tetapi dalam implementasinya divisi ini dibantu oleh seluruh jajaran yang ada di KPU Kabupaten Tanah Datar. Aktor dari dalam KPU Kabupaten Tanah Datar yang bertugas untuk menyampaikan materi adalah jajaran komisioner yang terdiri dari 5 orang, diantaranya adalah Ketua; Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia; Devisi Teknis Penyelenggaraan; Devisi Perencanaan, Data dan Informasi; Devisi Hukum dan Pengawasan.

Selain itu KPU Kabupaten Tanah Datar disini juga dibantu oleh badan adhoc yaitu PPK dan PPS dan KPPS yang sudah dibentuk di 14 Kecamatan yang ada di Kabupaten Tanah Datar guna melaksanakan kegiatan sosialisasi. Badan adhoc merupakan sebuah badan yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk membantu pelaksanaan kerja-kerja KPU terkait pemilu ataupun pemilihan baik di tingkat kecamatan, desa/kelurahan maupun tempat pemungutan suara (TPS).

Badan adhoc dalam pemilu terdiri dari anggota dan sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), anggota dan sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Panitia Pemutakhiran Data Pemilih/Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP/Pantarliah), dan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.

**Tabel 3. Badan Adhoc Kabupaten Tanah Datar**

No	Badan Adhoc	Jumlah
1.	PPK	70
2.	PPS	225
3.	KPPS	8.722
4.	PPDP/Pantarliah	1.246
5.	Petugas Keamanan dan Ketertiban TPS	2.492
<b>Jumlah</b>		<b>12.755</b>

Sumber : Data KPU Tanah Datar

Dalam pelaksanaan pemilihan umum legislatif di Tanah Datar 2019 yang lalu, terdapat 1.246 TPS (Tempat Pemungutan Suara) yang tersebar di 75 Nagari dan 14 Kecamatan di seluruh Kabupaten tanah Datar, dan dibantu oleh badan adhoc yang terdiri dari PPK berjumlah 70 orang, PPS ada 225 orang, petugas KPPS berjumlah 8.722 orang, PPDP berjumlah 1.246 orang dan Petugas Keamanan dan Ketertiban TPS berjumlah 2.492 orang. Sehingga jumlah personil

badan adhoc yang membantu tugas KPU berjumlah 12.755 orang.

Badan adhoc mempunyai peranan penting dalam melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat, baik PPK, PPS maupun KPPS. Karena sosialisasi pemilu juga menjadi tugas dari PPK dan PPS. Seperti yang sudah disebutkan dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 yaitu melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilu atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat. Begitu juga dengan PPS disebutkan bahwa PPS melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilu atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat. KPPS bertugas melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat pada hari pemungutan suara. Sosialisasi ini dilakukan oleh ketua KPPS kepada masyarakat tentang bagaimana prosedur pemungutan suara di TPS.

Kemudian KPU juga di bantu oleh kesbangpol dan stakeholder yang ada di Kabupaten Tanah Datar. Selain itu, KPU juga dibantu oleh relawan demokrasi yang berjumlah dari 55 orang yang terdiri dari 10 basis.

**Tabel 4. Relawan Demokrasi Pemilu 2019 Kabupaten Tanah Datar**

No	Kelompok Basis	Jumlah
1.	Keluarga	8 Orang
2.	Pemilih pemula	9 Orang
3.	Pemilih muda	7 Orang
4.	Pemilih perempuan	7 Orang
5.	Penyandang disabilitas	4 Orang
6.	Pemilih berkebutuhan khusus	4 Orang
7.	Kelompok marginal	4 Orang
8.	Komunitas	4 Orang
9.	Keagamaan	4 Orang
10.	Warga internet (Netizen)	4 Orang
<b>Jumlah</b>		<b>55 Orang</b>

Sumber : Data KPU Tanah Datar

Relawan demokrasi ini menjadi mitra KPU dalam menjalankan agenda

sosialisasi kepada masyarakat. Program relawan demokrasi adalah gerakan sosial yang ditujukan untuk meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam menggunakan hak pilih. Program tersebut melibatkan peran aktif masyarakat dalam upaya menanamkan nilai-nilai yang berkaitan dengan pemilu dan demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kepada setiap warga negara, dimana di dalamnya mencakup materi informasi ke pemilu, pemahaman mengenai aspek-aspek pemilu serta demokrasi.

Relawan demokrasi bertugas selama 3 bulan menjelang hari pemilu. Mereka bertugas untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait pemilu yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu. Anggota dari relawan demokrasi adalah pemuda, mahasiswa dan pemilih pemula. KPU Tanah Datar memiliki 55 orang jumlah anggota yang di bagi ke 10 basis. Bentuk kegiatan yang dilakukan oleh relawan demokrasi yaitu :

1. Basis keluarga, bentuk kegiatannya seperti sosialisasi ke ibu-ibu arisan, perkumpulan rutin tingkat jorong dan nagari, dan sebagainya.
2. Pemilih pemula, bentuk kegiatannya seperti sosialisasi ke SMA/SMK/MA sederajat se Tanah Datar.
3. Pemilih muda, bentuk kegiatannya seperti sosialisasi ke organisasi kepemudaan, mahasiswa kampus, dll.
4. Pemilih perempuan, bentuk kegiatannya seperti sosialisasi ke kelompok-kelompok perempuan seperti PKK, GOW, dsb.
5. Penyandang disabilitas, bentuk kegiatannya seperti sosialisasi ke komunitas/masyarakat penyandang disabilitas.
6. Pemilih berkebutuhan khusus, contohnya adalah dengan cara sosialisasi ke narapidana penghuni lembaga pemasyarakatan, masyarakat adat dan sebagainya.
7. Kelompok marginal, seperti sosialisasi ke pemulung.
8. Komunitas, bentuk kegiatannya seperti sosialisasi ke komunitas keolahragaan, komunitas motor.
9. Keagamaan, contoh kegiatannya adalah dengan cara sosialisasi ke jamaah sholat jum'at, ke kelompok yasinan dan pengajian.
10. Warga internet (netizen), sosialisasi melalui instagram dan juga facebook.

Dari pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa KPU Tanah Datar sangat berperan dalam hal sosialisasi politik untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya partisipasi politik masyarakat Kabupaten Tanah Datar pada pemilu 2019 yang lalu hingga menyentuh angka 72%. Sementara pada pemilu 2014 partisipasi masyarakat hanya mencapai angka 65%. Dibalik peningkatan partisipasi masyarakat ini, tentu ada upaya yang di lakukan oleh KPU Tanah Datar dalam melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat. Upaya-upaya yang di lakukan oleh KPU Tanah Datar adalah :

1. Melakukan sosialisasi tatap muka ke beberapa segmen, seperti segmen keluarga, pemilih pemula, pemilih muda, pemilih perempuan, pemilih disabilitas, pemilih berkebutuhan khusus, kaum marjinal, basis komunitas dan basis keagamaan
2. Bentuk kegiatan sosialisasi tatap muka yang dilakukan KPU seperti *KPU Goes to School*, *KPU Run*, *KPU Grebek Pasar*, sosialisasi melalui mobil keliling, diskusi bersama forum-forum warga, sosialisasi melalui kegiatan konser musik dan pagelaran seni.
3. Melaksanakan sosialisasi secara tidak langsung kepada masyarakat melalui beberapa metode seperti :
  - a. Menyebarkan *leaflet*, brosur, menempelkan *stiker*, meletakkan dan menempatkan spanduk, *pamflet*, *banner* dan baliho di tempat-tempat yang strategis
  - b. Melakukan sosialisasi pemilu melalui media massa elektronik seperti sosialisasi melalui siaran

radio Luhak Nan Tuo Tanah Datar dalam sebulan sekali

- c. Sosialisasi melalui media sosial seperti *instagram* dan *facebook*. Selain itu juga melalui laman website KPU Tanah Datar

Dalam melakukan sosialisasi ini, KPU dibantu oleh badan adhoc, *stakeholder*, kesbangpol, dinas kominfo dan relawan demokrasi dalam menyebarkan informasi mengenai pemilu kepada masyarakat Kabupaten Tanah Datar.

## 2. Kendala KPU Dalam Sosialisasi Politik Pada Pemilu 2019

Kendala merupakan suatu hambatan yang menyebabkan pelaksanaan suatu kegiatan terganggu atau kegiatan tersebut tidak dapat terlaksana dengan baik, dengan begitu akan sangat berpengaruh terhadap hasil capaian yang akan diperoleh. KPU Kabupaten Tanah Datar dalam upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Pada pelaksanaan pemilu 2019 KPU Kabupaten Tanah Datar mendapatkan beberapa kendala dalam proses pelaksanaan sosialisasi. Baik kendala yang bersifat internal maupun eksternal. Kendala tersebut sebagai berikut.

### a. Kendala Internal

Dalam melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat, KPU memiliki beberapa kendala internal. Kendala internal KPU Kabupaten Tanah Datar dalam melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat adalah kurangnya anggaran dalam melaksanakan sosialisasi dan keterbatasan dalam alat transportasi. Ketika KPU Tanah Datar melaksanakan berbagai kegiatan sosialisasi yang mengundang atau menghimbau masyarakat untuk hadir mengikuti acara yang KPU laksanakan, KPU tidak memiliki anggaran untuk memberikan dana transportasi kepada masyarakat yang akan mengikuti kegiatan sosialisasi tersebut. Akibatnya, beberapa masyarakat

menjadi tidak antusias mengikuti kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan oleh KPU Tanah Datar. Karena KPU tidak memiliki anggaran yang cukup untuk hal tersebut.

Kemudian keterbatasan alat transportasi seperti mobil keliling untuk melaksanakan sosialisasi ke masyarakat yang ada di berbagai daerah Kabupaten Tanah Datar. Maka dari itu, KPU Tanah Datar berkerjasama dengan Dinas Kominfo dalam hal ini, karena Dinas Kominfo mempunyai mobil keliling yang bisa dimanfaatkan untuk sosialisasi kepada masyarakat yang ada di berbagai daerah di Kabupaten tanah Datar.

**Tabel 5. Penggunaan Dana Kegiatan Sosialisasi Pemilu 2019**

No.	Kegiatan	Dana Yang Digunakan
1.	KPU Goes To School	Rp. 22.000.000
2.	KPU Run	Rp. 85.000.000
3.	Mobil Keliling	Rp. 14.000.000
4.	Konser Musik	Rp. 75.000.000
5.	Pagelaran Seni	Rp. 85.000.000
6.	KPU On Air	Rp. 14.000.000
7.	Menghadiri Forum Warga	Rp. 25.000.000

*Sumber : KPU Tanah Datar*

### b. Kendala Eksternal

Dalam melaksanakan sosialisasi, KPU Tanah Datar juga memiliki kendala eksternal dalam melaksanakan sosialisasi yaitu kendala yang berasal dari masyarakat itu sendiri.

Kendala eksternal dalam peran yang dilakukan KPU Tanah Datar dalam melaksanakan sosialisasi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat adalah terdapat beberapa masyarakat yang bersikap acuh, kurang respon dan tidak antusias jika diajak berpartisipasi dalam kegiatan sosialisasi yang dilakukan. Padahal, masyarakat sendiri merupakan sasaran dalam sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Tanah Datar.

## Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa :

1. Dalam melakukan perannya untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat, KPU Kabupaten Tanah Datar melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat. Kegiatan sosialisasi sendiri dilakukan dengan memperhatikan materi sosialisasi, metode sosialisasi yang digunakan dan pelaku/aktor dalam menyampaikan sosialisasi. Materi yang disampaikan dalam sosialisasi adalah materi mengenai kepemiluan. Metode sosialisasi yang digunakan adalah dengan tatap muka, media massa elektronik, penyebaran bahan sosialisasi serta, laman website KPU Kabupaten Tanah Datar dan media sosial. Pelaku/aktor dalam menyampaikan sosialisasi adalah KPU Tanah Datar yang dibantu oleh badan adhoc, *stakeholder*, kesbangpol, dinas kominfo dan relawan demokrasi dalam menyebarluaskan informasi mengenai pemilu kepada masyarakat Kabupaten Tanah Datar.
2. Kendala KPU Kabupaten Tanah Datar dalam melakukan perannya dalam sosialisasi politik untuk meningkatkan partisipasi masyarakat ada 2, yaitu kendala yang sifatnya internal dan eksternal. Kendala internal KPU Kabupaten Tanah Datar dalam sosialisasi politik adalah kurangnya anggaran dalam melaksanakan sosialisasi dan keterbatasan alat transportasi untuk melaksanakan sosialisasi ke daerah-daerah yang ada di Kabupaten Tanah Datar. Sedangkan kendala eksternal KPU Kabupaten Tanah Datar adalah masih terdapat masyarakat yang bersikap apatis terhadap politik sehingga susah di ajak untuk mengikuti kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Tanah Datar.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Afrizal. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Gulo, W. 2007. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Grasindo.
- Huntington, Samuel P. dan Joan M. Nelson. 1990. *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Salim, Syahrudin. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Citapustaka Media.
- Santoso, Topo & Budhiati, Ida. 2018. *Pemilu di Indonesia (Kelembagaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan)*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Susanto. 1992. *Pengantar Sosialisasi*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sutaryo. 2005. *Dasar-dasar Sosialisasi*. Jakarta: Rajawali Press.
- Suyanto, Bagong. 2010. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Kencana.

### Jurnal

- Afrilia, M., Surya, I., & Dyastari, L. (2017). Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2015 di Desa Manunggal Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang. *Ejournal Ilmu Pemerintahan*, 5(3), 1281-1294.
- Agus, A. A., Badaruddin, S., Muhkam, M. F., & Umalia, A. D. (2020). Pengaruh Pengetahuan Politik Terhadap Tingkat Partisipasi

- Politik Mahasiswa Pada Pemilihan Presiden Tahun 2019-2024 (Studi Pada Mahasiswa Jurusan PPKn FIS UNM). *Supremasi: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya*, 15(2).
- Arniti, N. K. (2020). Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Legislatif Di Kota Denpasar. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 4(2), 329-348.
- Dila, N., & Fitri, A. (2020). Peningkatan Partisipasi Pemilih Milenial: Strategi Komunikasi Dan Sosialisasi Komisi Pemilihan Umum Pada Pemilu 2019. *Makna: Jurnal Kajian Komunikasi, Bahasa, dan Budaya*, 7(2), 56-84.
- Elfitri, M., & Suryanef, S. (2021). Upaya Peningkatan Partisipasi Politik Masyarakat oleh Relawan Demokrasi Basis Warganet pada Pemilu Serentak 2019 di Kota Padang. *Journal of Education, Cultural and Politics*, 1(2), 39-47.
- Fitriani, Q., & Sari, M. M. K. (2018). Upaya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Untuk Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Pemula Melalui Rumah Pintar Pemilu Raden Paku. *Kajian Moral dan Kewarganegaraan*, 6(2).
- Hidayansyah, M., Handayani, T., & Syahri, M. (2018). Peran KPU Dalam Meningkatkan Partisipasi politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden 2014 Di Kota Malang. *Jurnal Civic Hukum*, 3(2), 184-194.
- Irawan, A. D. (2020). Pendidikan Pemilih Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Umum Serentak 2019. *Jurnal Hukum Replik*, 7(1), 55-70.
- Nidia, R. D., & Maharani, A. E. P. (2018). Upaya Komisi Pemilihan Umum Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pemilihan Umum Legislatif Di Kota Surakarta. *Res Publica*, 2(3), 330-347.
- Noor, M., Hairunnisa, H., & Ghufron, G. (2019). Analisis Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Samarinda Dalam Meningkatkan Komunikasi Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilu 2019. *Jurnal Penelitian Pers dan Komunikasi Pembangunan*, 23(2), 127-140.
- Novianty, F., & Octavia, E. (2018). Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Menumbuhkan Partisipasi Politik Bagi Pemilih Pemula Di Kecamatan Pontianak Barat. *Sosial Horizon: Jurnal Pendidikan Sosial*, 5(2), 293-303.
- Putri, M. P. (2016). Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Sosialisasi Pemilu Sebagai Upaya Untuk Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilu Presiden 2014 di Kalimantan Timur. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 30.
- Sumantri, S., Djuyandi, Y., & Muradi, M. (2018, October). Sosialisasi Politik Pasangan Calon Kepala Daerah Oleh KPU Kabupaten Bekasi Pada Pilkada Tahun 2017. *In Prosiding Seminar Nasional Cendekiawan* (pp. 1223-1229).

### **Undang-Undang & Peraturan**

Peraturan KPU RI No. 10 Tahun 2018 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.